



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614
Telepon 024-8311174 Faksimile 024-8311172 laman <http://www.jatengprov.go.id>
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024-2026

- Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Tugas Pokok : Fungsi Penunjang Pemerintahan (Keuangan)
- Fungsi : Membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- Fungsi :
 1. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
 5. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan;
 6. pembinaan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengolahan data keuangan Daerah serta memfasilitasi dana transfer Pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Tujuan :		
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		• Formulasi Pengukuran: Rata-rata dari persentase keselarasan, persentase penyerapan anggaran, persentase laporan pertanggung-jawaban yang disusun. • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: BPKAD Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Sasaran :		
Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Kaidah Perundang-Undangan	Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur hasil keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan • Formulasi Pengukuran: Jumlah dokumen penganggaran yang selaras dengan perencanaan dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dibagi Jumlah dokumen penganggaran yang selaras dengan perencanaan dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku yang disusun x 100% • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: BPKAD Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
	Persentase Realisasi APBD	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur capaian realisasi APBD • Formulasi Pengukuran: Realisasi APBD dibagi total APBD x 100% • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: BPKAD Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
	Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Perangkat Daerah • Formulasi Pengukuran: jumlah perangkat daerah yang menyusun dokumen laporan pertanggungjawaban dibagi keseluruhan perangkat daerah x 100%. • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		• Sumber Data: BPKAD Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Tujuan :		
Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur Pengelolaan Barang Milik Daerah • Formulasi Pengukuran: (Ketepatan waktu penyampaian RKBMD/RKPBMD)+(ketepatan waktu penyampaian laporan BMD dan berkualitas baik)+(Persentase BMD dilakukan pengamanan fisik dan hukum/sertifikat) pada keseluruhan OPD X100% • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: BPKAD Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Sasaran :		
Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan • Formulasi Pengukuran: Jumlah OPD yang mengelola Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi jumlah keseluruhan OPD x 100% • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: BPKAD Provinsi Jawa Tengah • Penanggung Jawab : Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Tujuan :		
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja perangkat daerah terkait pelaksanaan perbaikan tata kelola pemerintahan oleh perangkat daerah • Formulasi Pengukuran: (Nilai x Bobot Komponen Pengungkit) + (Nilai x Bobot Komponen Hasil) • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Self Assesment dengan QA Inspektorat • Penanggung Jawab : Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Sasaran :		
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur implementasi manajemen risiko di lingkup perangkat daerah • Formulasi Pengukuran: Total (Nilai komponen MR x Bobot) • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: <i>Self Assesment</i> dengan QA Inspektorat • Penanggung Jawab : • Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah • Formulasi Pengukuran: Nilai hasil survei kepuasan masyarakat dari 9 unsur SKM (skala 1-4) yang dikonversi menjadi IKM • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Survei eksternal ke <i>stakeholder</i> terkait • Penanggung Jawab : • Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah